

LAKIN
2023

INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG

Semakin Baik

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Bidang Penunjang adalah bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran pada Tahun 2023. Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2023.

Inspektorat Bidang Penunjang sebagai salah satu unit pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalandengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan, dimana pengawasan tidak hanya berperan sebagai “watch dog” semata tetapi juga harus dapat menjadi Quality Assurance dan menjadi Advisory Management bagi pelaku/pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga Inspektorat Bidang Penunjang dapat menjamin pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIN Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran selama tahun 2023 pada dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Inspektorat Bidang Penunjang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Bidang Penunjang, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder’s demi perbaikan kinerja Inspektorat Bidang Penunjang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN tersebut juga merupakan kebijakan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



RINGKASAN EKSEKUTIF



110.48%

**CAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT BIDANG
PENUNJANG**

98.71%

**REALISASI ANGGARAN
INSPEKTORAT BIDANG
PENUNJANG**



90%

**Persentase Catatan Hasil
Reviu (CHR) yang
ditindaklanjuti oleh satuan
kerja lingkup Inspektorat
Bidang Penunjang**

**Target : 90%
Realisasi : 100%**

90%

**Persentase rekomendasi
hasil audit yang
ditindaklanjuti oleh satuan
kerja lingkup Inspektorat
Bidang Penunjang**

**Target : 90%
Realisasi : 93%**

70%

**Persentase hasil
pengawasan eksternal
yang ditindaklanjuti
lingkup Inspektorat Bidang
Penunjang**

**Target : 70%
Realisasi : 100%**

90%

**Persentase hasil evaluasi
yang ditindaklanjuti oleh
satuan kerja lingkup
Inspektorat Bidang
Penunjang**

**Target : 90%
Realisasi : 95%**

Daftar Isi

Pendahuluan	01
Ringkasan Eksekutif	02
Daftar Isi	03
Bab I Pendahuluan	05
Bab II Perencanaan Kinerja	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
Bab IV Penutup	24

PENGANTAR

Inspektur Bidang Penunjang

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal dan dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan adalah Inspektorat Bidang Penunjang atas penggunaan anggaran dalam wujud pemberian informasi kinerja yang terukur kepada Inspektorat Jenderal sebagai UKE I atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Bidang Penunjang untuk meningkatkan kinerjanya.

Idit Supriadi Priatna

Dalam pelaksanaan capaian kinerja tahun 2023 tersebut, Inspektur Bidang Penunjang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Inspektorat Jenderal yang telah memberikan dukungan dan arahan atas pelaksanaan dan fungsi Inspektorat Bidang Penunjang kepada seluruh pegawai Inspektorat Bidang Penunjang guna mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal dan kepada seluruh stakeholder Inspektorat Jenderal yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang saling berkaitan.

BAB I

Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

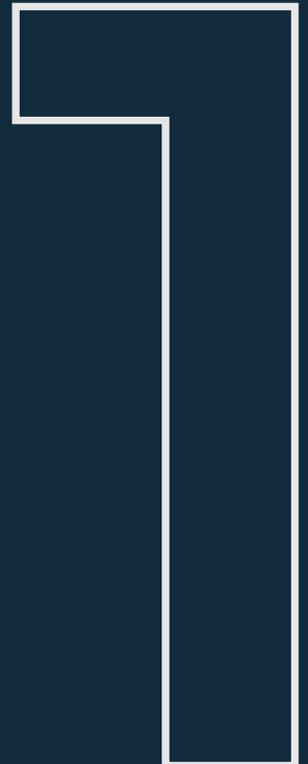
Maksud dan Tujuan

Aspek dan Tujuan

Aspek Strategis

Isu Strategis

Sistematika Laporan



Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Penunjang adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Inspektorat Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat.

FUNGSI

Adapun fungsi yang diemban Inspektorat Bidang Penunjang yaitu:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, di lingkungan Inspektorat Bidang Penunjang terdiri atas 1 (satu) Eselon II yaitu, Inspektur Bidang Penunjang, Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 13 (tiga belas) Auditor dan 1 (satu) Arsiparis, serta 1 Eselon IV yaitu Sub Bagian Tata Usaha. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Bidang Penunjang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Bidang Penunjang pada didukung oleh 16 orang pegawai. Jumlah tersebut digolongkan ke dalam beberapa jabatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Bidang Penunjang.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal. Jumlah pegawai per tahun 2023 sebanyak 16 (Enam Belas) pegawai, tersaji pada tabel berikut:

 <p>1 Inspektur Bidang Eselon II Golongan IV</p>	 <p>2 Auditor Ahli Madya Golongan IV</p>
 <p>1 Kasubag Tata usaha Eselon IV Golongan III</p>	 <p>3 Auditor Ahli Muda Golongan III</p>
 <p>1 Fungsional Arsiparis Golongan III</p>	 <p>5 Auditor Ahli Pertama Golongan III</p>
 <p>2 Auditor Ahli Terampil Golongan II</p>	 <p>1 Auditor Mahir Golongan II</p>

Berdasarkan Uraian di atas dapat dilihat bahwa jabatan auditor mendominasi di Inspektorat Bidang Penunjang. Hal ini disebabkan tugas yang diemban di Inspektorat Bidang Penunjang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Isu Strategis

Inspektorat Bidang Penunjang merupakan salah satu Unit Eselon II yang berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial merupakan salah satu unit yang melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.

Adapun program yang menjadi isu strategis pengawasan Inspektorat Bidang Penunjang Tahun 2023 adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. (TLHP).

TLHP dilakukan terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



BAB II

Perencanaan Kinerja

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Inspektur Bidang Penunjang sebagai penerima amanah dari Inspektur Jenderal atas kinerja Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	90%
		2.	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang Info	90%
		3.	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang Info	90%
		4.	Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	70%
		5.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang	A
		6.	Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Penunjang	100%

Dalam hal ini, 1 (satu) sasaran kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja beserta targetnya masing-masing dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Inspektur Bidang Penunjang yang ditandatangani Inspektur Jenderal sebagai pernyataan kesanggupan/kesediaan Inspektur Bidang Penunjang menjalankan tugas dengan segala konsekuensinya dengan indikator kinerja berupa Capaian IKK.



BAB III

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Analisis Efisiensi

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Bidang Penunjang merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Bidang Penunjang kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya sebagai unsur penunjang dalam memberikan fasilitas/layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Sosial pada tahun 2023. Penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektur Bidang Penunjang dilakukan melalui pengukuran kinerja.

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2023, Inspektorat Bidang Penunjang telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab organisasi. Berikut diuraikan kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan:

Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2023 Inspektorat Bidang Penunjang memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan dan 6 (lima) Indikator Kinerja. Secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persen
1	Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	90%	90%	103
		2.	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	90%	100%	111
		3.	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	90%	95%	106

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persen
1	Meningkatkannya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	4.	Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	70%	100%	143
		5.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang	A	A	100
		6.	Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Penunjang	100%	100%	100

Secara umum capaian IKK Inspektorat Bidang Penunjang pada tahun 2023 sudah terealisasi, sebanyak 5 (tiga) Indikator Kinerja capaiannya 100%.

Evaluasi dan Analisis IKK

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKK sebagaimana yang terdapat pada penetapan kinerja tahun 2023. Adapun penjelasan capaian IKK selama tahun 2023 adalah sebagai berikut



1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang

Rekomendasi temuan hasil Audit yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkup Inspektorat Bidang Penunjang pada tahun 2023 minimal 90% agar dapat dikatakan memenuhi target.

Satker Mitra di Inspektorat Bidang Penunjang adalah Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2023 dari total 6 Audit pada Balai, 3 sudah melewati waktu 60 hari dari batas maksimal rekomendasi harus ditindaklanjuti dan sisanya masih dibawah 60 hari yang menjadikan belum dapat dimasukkan dari target IKK 1.

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	%
1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	-	-	93%	90%	103%

Pada IKK 1 Inspektorat Bidang Penunjang mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Namun IKK terbut merupakan IKK baru dan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan target dan realisasinya tahun sebelumnya.

2. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang

Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang minimal 90% agar dapat dikatakan memenuhi target.

Beberapa kegiatan Reviu yang terselenggara ditahun 2023 yaitu: Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan kinerja, Reviu RKA K/L, Reviu RK BMN, Revisi Anggaran, dsb.

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	%
2. Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	-	-	100%	90%	111%

Pada IKK 2 Inspektorat Bidang Penunjang mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Namun IKK tersebut merupakan IKK baru dan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan target dan realisasinya tahun sebelumnya.

3. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang

Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang minimal 90% agar dapat dikatakan memenuhi target.

Beberapa kegiatan Evaluasi yang terselenggara ditahun 2023 yaitu: Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Evaluasi BMN.

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	%
3. Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	-	-	90%	95%	106%

Pada IKK 3 Inspektorat Bidang Penunjang mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Namun IKK terbut merupakan IKK baru dan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan target dan realisasinya tahun sebelumnya.

4. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Penunjang

Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Penunjang minimal 90% agar dapat dikatakan memenuhi target.

Beberapa kegiatan TLHP yang terselenggara ditahun 2023 yaitu: TLHP Sekjen, dan TLHP Balai-Balai

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	%
4. Pesentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Penunjang	79%	78%	70%	100%	143%

Dari Total Temuan 1 yang terkait dengan satker Inspektorat Bidang Penunjang di Pusdatin di temuan Laporan Keuangan 2023, Satker/Pusdatin telah menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan tersebut maka menjadikan target ditahun 2023 tercapai dengan.

5. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang

Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya dalam melaksanakan core competency setiap lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara optimal, transparan, akuntabel, adil dan responsif, diperlukan adanya komitmen penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dari semua pihak.

Komitmen tersebut harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wujud keberpihakan pada integritas, profesionalisme serta etos kerja, efisiensi dan efektifitas maupun moral yang tinggi dari setiap penyelenggara negara. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara dituntut untuk mampu memikul tanggungjawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang Kementerian Sosial dapat dilihat dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 di tingkat Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal Skor 80... (A), dan Inspektorat Jenderal Skor 80,..... (A).

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	%
Predikat Hasil Evaluasi SAKIP UKE 1 mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang	77.19%	79.121%	A%	A%	100%

Persentase capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan range kategori nilai AKIP yang terdapat pada Permenpan nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 dicapai dengan realisasi persentase sebesar 100%. Beberapa perubahan yang telah dilakukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja adalah mengaplikasikan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e-kinerja yang berada pada biro perencanaan, lalu merumuskan ulang sasaran program dan indikator dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard.

Upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini antara lain Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Teknis, Pemeriksaan Kinerja, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Sosial dan Reviu Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan penyusunan peta strategis mulai dari level eselon I sampai dengan eselon IV.

6. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Penunjang

Evaluasi Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud terdapat beberapa tata cara pengendalian yang diatur, antara lain pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti antara lain melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Hasil evaluasi ditindak lanjuti dalam bentuk pelaporan yang merupakan salah satu kegiatan penting di dalam proses pembangunan.

Capaian indikator Persentase Realisasi Keuangan Inspektorat Bidang Penunjang Tahun 2023, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	%
6. Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Penunjang	99.80%	99.88%	100%	100%	100%

Bila dilihat dari tabel diatas, Persentase terselenggaranya Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 adalah 100%, dibandingkan target sebesar 100% yang artinya mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Bidang Penunjang untuk agar penyerapan melampaui target adalah dengan melakukan pemantauan rencana pencairan anggaran setiap bulan, melakukan rekonsiliasi anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing pelaksana kegiatan secara berkala serta melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran yang dianggap perlu.

Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Penunjang **Tahun 2023** dengan Pagu Anggaran Awal sebesar **Rp3.214.010.000,00**, dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.136.125.005,00**, atau sebesar **97,58%**

Jenis Belanja	Anggaran Inspektorat Bidang Penunjang			
	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Barang (52)	3.214.010.000	3.136.125.005	77.884.995	97,58

Dilihat dari realisasi anggaran **Tahun 2023**, penyerapan anggaran sebesar **Rp3.136.125.005,00** atau sebesar **97,58%** dari total anggaran Inspektorat Bidang Penunjang.

Beberapa kendala yang dialami dalam proses penyerapan anggaran Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 adalah :

1. Penugasan mendadak sehingga waktu persiapan pendek;
2. Terbatasnya jumlah SDM auditor yang terdapat di Inspektorat Bidang Penunjang tidak sebanding dengan luasnya objek pemeriksaan.

Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja Inspektorat Bidang Penunjang di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu perlunya membuat penjadwalan audit sesuai PKPT yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan audit disesuaikan dengan kebutuhan (Risiko & Anggaran).



BAB IV

Penutup



4

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Bidang Penunjang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. Dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan Inspektorat Bidang Penunjang yang terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja di tahun 2023, 4 (empat) IKK dapat terealisasi 100%. Dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan Inspektorat Bidang Penunjang yang terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja di tahun 2023, 3 (tiga) IKK dapat terealisasi 100% sesuai target.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran Inspektorat Bidang Penunjang tahun 2023 adalah sebesar Rp3.214.010.000,00, yang diperuntukkan bagi belanja barang dan pegawai. Dari pagu anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp3.136.125.005,00, atau sebesar 97,58% dari total anggaran Inspektorat Bidang Penunjang.

Untuk mempertahankan dan/atau lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja Inspektorat Bidang Penunjang di masa yang akan datang, hal-hal yang mungkin perlu dilakukan antara lain rencana kinerja tahunan disusun secara akurat, integral, komprehensif, dengan tetap memperhatikan Renstra dan Kebijakan Pengawasan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan Inspektorat Bidang Penunjang; serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

LAKIN Inspektorat Bidang Penunjang Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kualitas kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang terkait guna perbaikan laporan ini. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.